

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Subyek, Obyek, dan Lokasi Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah ketua dari berbagai macam gerakan mahasiswa di Surabaya. Berikut profil informan :

- a. Nama : Cona
- Usia : 23 Tahun
- Pendidikan : Mahasiswa Semester 9 di UNTAG Surabaya
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status Informan : Ketua Kamus PR

Peneliti memilih Cona sebagai informan karena dia merupakan ketua kampus PR Untag, sehingga ia merupakan key word sumber gerakan mahasiswa khususnya di kamus PR. Sehingga ia sangat paham terhadap pola gerakan yang diterapkan oleh mahasiswa.

- b. Nama : Birul
- Usia : 20 Tahun
- Pendidikan : Mahasiswa Semester 7 di UWK Surabaya
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status Informan : Ketua SMI

Peneliti memilih Birul sebagai informan sebab dia merupakan Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia di cabang Surabaya, sehingga ia

mampu mengkoordinir element element gerakan mahasiswa yang ada di Surabaya.

- c. Nama : Adit
Usia : 20 Tahun
Pendidikan : Mahasiswa Semester 7 UNITOMO
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status Informan : Sekretaris GMNI Surabaya

Peneliti memilih Adit sebagai informan karena dia merupakan mahasiswa Nasionalis yang selalu melindungi hak-hak masyarakat dengan cara khasnya yang selalu berada di garda terdepan ketika turun jalan.

- d. Nama : Amar
Usia : 22 Tahun
Pendidikan : Mahasiswa Semester 5 IAIN Sunan Ampel
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status Informan : Kordinator Advokasi Left Democratic Force

Peneliti memilih Amar sebagai informan karena dia merupakan aktor ketika melakukan sebuah teatrikal terkait dengan isu yang dia angkat sehingga mampu menarik media untuk mengesponya.

- e. Nama : Kholis
Usia : 20 Tahun
Pendidikan : Masiswa Semester 5 UWK Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Informan : Ketua LMND

Peneliti memilih Kholis sebagai informan karena dia merupakan mahasiswa terkenal dengan ciri khasnya pemberani dalam melakukan sebuah perlawanan demi mewujudkan sebuah perubahan.

f. Nama : Faizal Mahzan

Usia : 23 Tahun

Pendidikan : Masiswa Semester 5 UWK Surabaya

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Informan : Ketua PMII Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Peneliti memilih faizal mahzan sebagai informan, sebab dia merupakan ketua PMII Rayon Dakwah yang paham betul terkait dalam dunia gerakan dan selalu up date terhadap isu-isu yang sedang hangat untuk diperpinjangkan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penlitian adalah Pola komunikasi dan proses komunikasi gerakan mahasiswa di Surabaya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti di seputar kampus yang ada di Surabaya dan di kantor-kantor pemerintah Surabaya yakni:

- a. Jalan Pemuda No. 7 Surabaya (Depan Gedung Grahadi)
- b. Jl. Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Indonesia (Depan Gedung Tugu Pahlawan)
- c. Jl. Indrapura No. 1 Kota Surabaya (Gedung DPRD Jawa Timur)

- d. Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya (Basecamp LDF Surabaya)
- e. Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya (Basecamp LMND)
- f. Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya (Basecamp Kampus PR)

Karena salah satu fungsi Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Dalam segi perguruan tinggi pun di Surabaya tidak kurang dari 60 perguruan tinggi ada di kota metropolis kedua ini, dan ini juga menyebabkan angka peserta didik dalam tataran sebagai mahasiswa juga semakin banyak baik yang perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Diantaranya adalah Institut Teknologi Sepuluh November, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Kristen Petra, Unika Widya Mandala, Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Dr. Soetomo, Universitas Merdeka, Universitas Narotama, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Bhayangkara, Universitas Wijaya Putra, Universitas Muhammadiyah, Universitas Yos Sudarso, Universitas WR. Supratman, Universitas Putra Bangsa, Institut Teknologi Pembangunan, IKIP Widya Darma dan lain-lain.

Maka dari itu sebagai kota profensi jawa timur maka banyak pula gerakan –gerakan mahasiswa yang lahir di kota ini yaitu diantaranya :

SMI

Embrio Persatuan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) adalah organisasi yang tidak lahir begitu saja, namun SMI mempunyai sejarah yang cukup panjang terutama dalam proses pembangunannya. Diawali sejak akhir tahun 2001 terbentuk Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI) yang terdiri dari Organisasi-Organisasi gerakan mahasiswa tingkat kota (wilayah) yaitu Keluarga Mahasiswa Yogyakarta (KMY), Komite Mahasiswa Mataram (KOMIT) setelah melakukan ekspansi di beberapa kampus berubah namanya menjadi Komite Mahasiswa Mataram untuk Demokrasi (KOMID), Dewan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (DEMARKASI – Malang) & Komite Mahasiswa Malang untuk Demokrasi (KOMANDO) yang dalam prosesnya kedua organisasi di Malang tersebut melakukan Unifikasi dan berubah menjadi Serikat Mahasiswa Malang (SMM), Di Semarang ada Serikat Mahasiswa Kaligawe (SEMAK) yang kemudian berubah menjadi Keluarga Aktivis Mahasiswa Demokratik (KAMD) setelah melakukan perluasan di beberapa kampus di Semarang, Di Pekalongan ada Keluarga Mahasiswa Sekolah Sadar Sosial (KM-S3), Di Jakarta ada Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMJ) dan KM-Gunadharma serta KM-ISTN yang juga melakukan unifikasi menjadi Gerakan Mahasiswa Jabodetabek (GM-Jabodetabek), Di Surabaya ada Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SAMSARA), Di Bengkulu ada Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD), Di Palembang ada Gerakan Solidaritas Mahasiswa Palembang (

Gersos- MP), Di Jombang ada Komite Aksi Mahasiswa Jombang (KAMAJO) dan Jaringan Solidaritas Mahasiswa Jombang (JSMJ) yang kemudian unifikasi menjadi Serikat Mahasiswa Jombang (SMJ), Di Pasuruan ada Forum Diskusi Mahasiswa Merdeka (FORDISMA). Bahwa fragmentasi yang terjadi dalam perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh sisa-sisa pola gerakan mahasiswa 1998 ketika Indonesia di bawah rezim ditaktor otoriterian “Soeharto”.

Semangat persatuan yang ada di masing-masing organisasi di setiap wilayah Indonesia tersebut menjadi benang merah yang terus diproses secara bersama-sama menuju tahapan-tahapan yang kualitatif. Artinya ketika kita bersama memandang persoalan di setiap kampus / universitas, khususnya dunia pendidikan serta permasalahan rakyat lainnya secara umum. Ternyata memang berasal dari satu sumber kebijakan yaitu Negara beserta alat-alatnya yang memang masih sangat tunduk kepada kaum modal (kapitalisme internasional). Artinya beberapa persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan alat perjuangan yang mempunyai karakter lokalistik atau bersandar pada setiap wilayah saja, akan tetapi dibutuhkan alat persatuan dan perjuangan secara nasional yang dapat lebih keras ketika memukul rezim borjuasi.

- Tahapan Maju Menuju Persatuan Gerakan Mahasiswa

KPBI (Komite Pendidikan Bersama Indonesia) pada waktu itu hanya melakukan pendidikan-pendidikan bersama secara nasional dan melakukan pertemuan-pertemuan yang terdiri dari pertemuan sisipan setiap 3 bulan sekali dan pertemuan Nasional setiap 6 bulan sekaligus pelatihan nasional, Dalam proses Dialektikanya ketika perspektifnya semakin maju maka kemudian pada saat pertemuan KPBI di Semarang tahun 2004 menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan kerangka bangunan Ormass Mahasiswa Tingkat Nasional. Pada pertemuan tersebut pula KPBI berubah menjadi Komite Persiapan Serikat Mahasiswa Indonesia (KP – SMI), Setelah itu kemudian mulai berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan pembangunan Ormass Mahasiswa tingkat Nasional, KP-SMI secara struktur terdiri dari Sekretaris Umum, Komisi Pendidikan dan Propaganda, Komisi Organisasi dan Jaringan kemudian setelah ada kebutuhan lebih lanjut komposisinya ditambah satu perangkat lagi yaitu Ketua Umum, Semua perangkat tersebut bekerja untuk penguatan Infrastruktur dan Suprastruktur Organisasi. Kemudian setelah semuanya sudah siap maka pada tanggal 15-18 Agustus 2006 Serikat Mahasiswa Indonesia / SMI melangsungkan Konferensi Nasional (KONFERNAS) yang pertama di Semarang, Sejak tanggal 17 Agustus 2006 (Hari Kelahiran SMI) maka secara De facto maupun De jure telah berdiri satu Organisasi Massa Mahasiswa Tingkat Nasional yaitu Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang siap berdinamika di kancah Gerakan Demokratik tingkat Nasional

dan siap mengemban tugas-tugas perjuangan massa Mahasiswa di Indonesia.

LMND

LMND atau Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi adalah sebuah organisasi politik ekstrakampus skala nasional berbentuk Liga yang dibentuk pada tanggal 9-11 Juli 1999 di Bogor oleh 20 komite aksi mahasiswa yang aktif dalam proses Reformasi. Seiring perkembangan dialektika antara situasi ekonomi politik nasional dan situasi internal organisasi, sampai saat ini LMND telah berhasil meluas dan hadir di 25 provinsi dan lebih dari 100 kota.

1. Tujuan dan pola LMND

Seperti digariskan pada AD/ART-nya, LMND bertujuan untuk menghancurkan sistem yang menindas hak-hak rakyat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkedaulatan rakyat.

Begitulah yang terumus di garis organisasi. Sedangkan perjalanan organisasinya adalah sebagai berikut: LMND pada awalnya didirikan pada tahun 1999 sebagai respon komite-komite aksi mahasiswa yang progresif dan radikal terhadap kegagalan proses Reformasi menjawab tuntutan rakyat pada saat itu, yaitu: pembentukan pemerintahan persatuan rakyat dan pengenyahan sisa Orde Baru (Dwi

Fungsi ABRI dan Golkar). Konsisten dengan garis perjuangan anti-Orde Baru-nya, pada tahun 2001 LMND memberikan dukungan penuh pada tindakan demokratik Presiden Abdurachman Wahid (Gus Dur) untuk menyapu habis sisa-sisa Orde Baru yang masih menggeliat gelepar. Saat itu, bersama kelompok pro-Gus Dur lainnya, LMND harus berhadapan dengan koalisi besar yang anti Gus Dur- sebuah koalisi taktis dari elemen reaksioner sisa Orde Baru (Militer, Golkar, PPP) dan sebagian elemen yang mendapat keuntungan dari proses Reformasi seperti PDIP, PAN, PKS, dll. Saat itu, karena keraguan-raguan Gus Dur, koalisi yang dimotori oleh Orde Baru menang dan Gus Dur terguling. Kemudian, naiklah Megawati Sukarnoputri (PDIP) dan Hamzah Haz (PPP) sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Seiring itu, dimulai pula restrukturisasi sisa kekuatan Orde Baru dan penerapan proyek neoliberalisme di Indonesia.

Bagi LMND, kegagalan perjuangan untuk kedua kalinya (tergulingnya Gus Dur dan bangkit kembalinya kekuatan Orde Baru) tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus membela rakyat tertindas. Kenaikan BBM lebih beberapa kali pada masa Rezim Mega-Hamzah telah semakin menyengsarakan rakyat yang belum pulih 'luka' ekonominya paska krisis moneter tahun 1997. Digadaikannya beberapa perusahaan negara (yang strategis) kepada pemodal asing, sebagai syarat pendaftaran menjadi mandor bagi imperialisme asing, telah melukai kemandirian dan kedaulatan bangsa kita. Juga tidak boleh lupa

soal hadiah proyek DOM Aceh bagi militer fasis yang telah mencederai kemanusiaan di Tanah Rencong. Maka, sudah menjadi keharusan sejarah bagi LMND bahwa: Rezim Mega-Hamzah, gabungan antara kekuatan yang pro imperialis asing dan sisa Orde Baru, harus dilawan meski harus bersimbah darah di jalanan dan keluar masuk penjara.

Di tengah sengit perlawanannya terhadap Rezim yang ada, dengan pertimbangan ekonomi-politik yang tajam, pada tahun 2003 LMND berani mengambil tindakan politik yang berbeda dari kegamangan umum Gerakan Mahasiswa (yang masih disekap jargon Moral Force maupun Social Movement) saat itu, yaitu: bertemu dan berdiskusi dengan gerakan lintas sektoral (tani, buruh, kaum miskin kota) yang progresif lain, sampai menghasilkan keputusan politik untuk bersama-sama saling membahu, membentuk sebuah partai politik elektoral ber-platform kerakyatan untuk mersepon Pemilu Parlemen 2004. Nama persatuan mereka saat itu adalah Partai Oposisi Rakyat (POPOR). Meski gagal akibat sempitnya waktu untuk memenuhi verifikasi pemilu (hanya sekitar 3 bulan), tindakan tersebut telah LMND anggap tepat sebagai sebuah taktik politik ‘termungkin’ pada saat itu.

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seorang mantan petinggi militer Angkatan Darat yang sempat dididik di Amerika, dan Jusuf Kalla (JK), salah satu pengusaha kaya Golkar, pada

ajang Pemilu Presiden 2004 dan kemenangan Partai Golkar di Pemilu DPR-RI 2004, dipandang LMND sebagai bangkitnya Orde Baru berjubah anyar: neoliberalisme. Sah sudah mereka berdua sebagai mandor barunya imperialisme, mengalahkan gerbong elit politik pengusaha Mega-Hasyim (yang sempat membeli tiket pendaftaran saat berkesempatan menjadi rezim), Wiranto-Solahuddin Wahid, dan pasangan kaum borjuis lainnya. Naiknya rezim neoliberal SBY-JK tahun 2004 pun tak luput direspon seluruh struktur LMND di Indonesia dengan turun ke jalan. Dan terbukti benarlah pandangan LMND terhadap watak rezim yang baru ini: selama perjalanan kekuasaannya, SBY-JK setia memaksakan kebijakan-kebijakan neoliberal, yang memiskinkan dan mengadaikan kesejahteraan rakyat, meski penolakan di tingkat parlemen maupun di kalangan gerakan massa (akar rumput) dan mahasiswa cukup luas.

Tahun 2006 sampai 2007: Dengan pertimbangan untuk memenuhi amanat Strategi dan Taktik Kongres IV LMND untuk intervensi ajang elektoral 2009, juga setelah memandang tidak terlalu berbedanya situasi ekonomi politik bangsa, LMND mengulang taktik politik parlementariannya dengan sebuah semangat yang baru, yaitu: Pembebasan Nasional dari Imperialisme. Nama partai yang dibentuk LMND adalah Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Ya, LMND adalah salah satu organisasi pembentuk, yang kemudian

mengikrarkan diri sebagai salah satu tiang penunjang (underbow) partai politik elektoral tersebut.

Bukti kebenaran dari taktik politik yang dipilih oleh LMND adalah telah semakin luasnya sentimen anti penjajahan asing, baik dari kalangan elit politik maupun gerakan, sedangkan pada saat yang sama kesadaran mayoritas massa rakyat masih elektoral. Sekarang tinggal mengolahnya dalam baskom panggung politik yang terbuka 'agak' lebar: Pemilu Parlemen dan Presiden tahun 2009. Partai mereka adalah Papernas dan Calon Presiden mereka adalah Dita Indah Sari- karena bagaimanapun rakyat perlu simbol perlawanan dan kemanusiaan. Mengingat begitu banyak pembantaian antar sesama (horizontal) selama kurun waktu empat dasawarsa, maupun begitu dalamnya penghisapan imperialisme terhadap kekayaan alam kita pada kurun waktu yang sama pula.

PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan independen, non-profit, yang didirikan pada 17 April 1960, di Surabaya. Identitas PMII secara umum terletak pada tiga ruang gerak: Intelektual, Keagamaan, dan Kebangsaan. Identitas tersebut menjadi kekuatan moral dan spiritual untuk memaknai kehidupan berbangsa yang sasarannya adalah untuk menegakkan asas keadilan sosial,

mengimplementasikan kedaulatan rakyat (demokrasi), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final.

Sebagai organisasi Islam, PMII meyakini bahwa kehadirannya adalah untuk mewujudkan peran khalifatullah fil ardhi, meneruskan risalah kenabian dan menjadi rahmat bagi semua manusia. Sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila, PMII mempunyai komitmen kebangsaan yang utuh dan proporsional, yang diaktualisasikan melalui partisipasi dalam pembangunan watak bangsa yang berprikemanusiaan dan berkeadilan.

Integrasi dari paham keagamaan dan kebangsaan tersebut, mengharuskan PMII berdialektika aktif dengan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan nyata dari dialektika itu adalah komitmen organisasi terhadap persoalan-persoalan mendasar masyarakat dan kemanusiaan, yang seringkali merupakan akibat negatif yang mengiringi proses pembangunan. Secara kategoris, persoalan-persoalan itu dapat dipilah ke dalam beberapa hal: persoalan keberagaman dan kebudayaan; pemerataan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat sipil (civil society) dan penegakan hak asasi manusia; dan kepedulian terhadap lingkungan. Realitas dalam gambaran ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah PMII dan orientasi pengembangan yang dilakukan. Gerak perubahan dimengerti dalam bangunan kesejati kesadaran atas realitas yang penuh, kepercayaan kekuatan budaya, tradisi, dan ritualnya, pilihan gerakan dan keberpihakan

serta dalam bentuknya yang sangat praktis pola-pola gerakan yang dikembangkan. Revolusi makna PMII mulai dari penumbuhan wacana Independensi sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensinya dari intervensi, kooptasi, dan hegemoni kekuatan mainstream dari luar, termasuk yang dikembangkan dan diideologikan oleh negara.

Wacana Independensi kemudian berkembang dan terus melakukan metamorfosis sampai pada titik baru bangunan kemandirian. Sebagai upaya untuk mengarahkan pada kekuatan masyarakat yang independen dan mempunyai kemandirian, kemudian tumbuh filosofi gerakan Liberasi. Pendekatan Akhlussunnah Waljama'ah bukan lagi sebagai sebuah mazhab tetapi sebagai manhaj al-fikr (metodologi berfikir) dengan melakukan telaah kritis atas nilai-nilai universal yang memihak kepada masyarakat (civil society), telaah kritis atas wacana-wacana yang dikembangkan negara, serta pembiasaan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai perwujudan cita-cita masyarakat terbuka (open society) dan sejahtera. Sehingga free market of ideas betul-betul terjadi dalam ruang publik. Wacana ini kemudian sebagai mainstream gerakan dan menjadi pijakan pergerakan secara institusional.

VISI DAN MISI PMII

- a. Dikembangkan dari dua landasan utama, yakni visi ke-Islaman dan visi kebangsaan. Visi ke-Islaman yang dibangun PMII adalah visi ke-Islaman yang inklusif, toleran dan moderat. Sedangkan

visi kebangsaan PMII mengidealkan satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun di atas semangat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi segenap elemen warga-bangsa tanpa terkecuali.

- b. Merupakan manifestasi dari komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran ini, PMII sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk

GMNI

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau disingkat GMNI, lahir sebagai hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi itu ialah:

1. GERAKAN MAHASISWA MARHAENIS, berpusat di Jogjakarta
2. GERAKAN MAHASISWA MERDEKA, berpusat di Surabaya
3. GERAKAN MAHASISWA DEMOKRAT INDONESIA, berpusat di Jakarta.

Proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa mulai tampak, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.

Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seazas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positif.

Setelah melalui serangkaian pertemuan peninjauan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain :

1. Setuju untuk melakukan fusi
2. Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi bernama "Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia " (GMNI).
3. Azas organisasi adalah: MARHAENISME ajaran Bung Karno.
4. Sepakat mengadakan Kongres I GMNI di Surabaya, dalam jangka waktu enam bulan setelah pertemuan ini.

Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:

1. Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka :

- SLAMET DJAJAWIDJAJA
 - SLAMET RAHARDJO
 - HERUMAN
2. Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis :
- WAHYU WIDODO
 - SUBAGIO MASRUKIN
 - SRI SUMANTRI MARTOSUWIGNYO
3. Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia :
- S.M. HADIPRABOWO
 - DJAWADI HADIPRADOKO
 - SULOMO

Dengan direstui Presiden Sukarno, pada tanggal 22 Maret 1954, dilangsungkan KONGRES I GMNI di Surabaya. Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi GMNI (Dies Natalis) yang diperingati hingga sekarang. Adapun yang menjadi materi pokok dalam Kongres I ini, selain membahas hasil-hasil kesepakatan antar tiga pimpinan organisasi yang ber-fusi, juga untuk menetapkan personil pimpinan di tingkat pusat.

Sehubungan dengan banyak persoalan yang sebenarnya belum terselesaikan dalam forum Kongres I, maka dua tahun kemudian (1956), GMNI kembali menyelenggarakan KONGRES II GMNI di Bandung, dengan pokok persoalan di seputar masalah konsolidasi internal organisasi. Sebagai hasil realisasi keputusan Kongres II ini, maka Organisasi cabang GMNI mulai tertata di beberapa kota.

Akibat dari perkembangan yang kian meningkat di sejumlah basis organisasi, tiga tahun setelah Kongres II, GMNI kembali menyelenggarakan KONGRES III GMNI di Malang tahun 1959, yang dihadiri sejumlah Utusan cabang yang dipilih melalui Konperensi Cabang masing-masing. Berawal dari Kongres III ini, GMNI mulai meningkatkan kiprahnya, baik dalam lingkup dunia perguruan tinggi, maupun ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitan dengan hasil Kongres III ini, masih pada tahun yang sama (1959) GMNI menyelenggarakan Konperensi Besar GMNI di Kaliurang Jogjakarta, dan Presiden Sukarno telah berkenan ikut memberikan Pidato Sambutan yang kemudian dikenal dengan judul "Hilangkan Steriliteit Dalam Gerakan Mahasiswa !".

Untuk lebih memantapkan dinamika kehidupan pergerakan GMNI, maka direncanakan pada tahun 1965 akan diselenggarakan Kongres V GMNI di Jakarta. Namun Kongres V tersebut gagal terlaksana karena gejolak politik nasional yang tidak menentu akibat peristiwa G30S/PKI. Kendati demikian, acara persiapannya sudah sempat direalisasi yakni Konperensi besar GMNI di Pontianak pada tahun 1965. Dalam Konferensi besar ini telah dihasilkan kerangka Program Perjuangan, serta Program Aksi bagi Pengabdian Masyarakat.

Dampak peristiwa G30S/PKI bagi GMNI sangat terasa sekali, sebab setelah peristiwa tersebut, GMNI dihadapkan pada cobaan yang

cukup berat. Perpecahan dalam kubu Front Marhaenis ikut melanda GMNI, sehingga secara nasional GMNI jadi lumpuh sama sekali. Di tengah hantaman gelombang percaturan politik nasional yang menghempas keras, GMNI mencoba untuk bangkit kembali melakukan konsolidasi. Terlaksana KONGRES V GMNI di Salatiga tahun 1969 (yang seharusnya di Jakarta tetapi gagal dilaksanakan). Namun Kongres V ini tetap belum bisa menolong stagnasi organisasi yang begitu parah.

Namun demikian kondisi ini tampaknya telah membangkitkan kesadaran kesadaran baru dikalangan warga GMNI, yakni kesadaran untuk tetap bergerak pada kekuatan diri sendiri, maka mulai 1969, thema "Independensi GMNI" kembali menguasai lam pikiran para aktivis khususnya yang berada di Jakarta dan Jogjakarta. Tuntutan Independensi ini mendapat reaksi keras, baik dari kalangan Pimpinan Pusat GMNI maupun dari PNI/Front Marhaenis. Tuntutan independensi ini sebenarnya merupakan upaya GMNI untuk kembali ke "Khittah" dan "Fitrah" nya yang sejati. Sebab sejak awal GMNI sudah independen. Tuntutan ini sesungguhnya sangat beralasan dan merupakan langkah antisipasi, sebab tidak lama kemudian terjadi restrukturisasi yang menyebabkan PNI/FM berfusi kedalam PDI.

Setelah gejolak politik reda GMNI kembali memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kembali organisasinya. Dilaksanakan KONGRES VI GMNI di Ragunan-Jakarta tahun 1976, dengan thema pokok: "Pengukuhan Independensi GMNI serta Konsolidasi

Organisasi". Hal lain yang patut dicatat dalam Kongres VI ini adalah penegasan kembali tentang Azas Marhaenisme yang tidak boleh dicabut oleh lembaga apapun juga, serta perubahan model kepemimpinan kearah kepemimpinan kolektif dalam bentuk lembaga Presidium.

Selain itu, Kongres VI mempunyai arti tersendiri bagi GMNI, sebab mulai saat itu telah terjadi regenerasi dalam keanggotaan GMNI, yang ditandai dengan munculnya sejumlah pimpinan basis dan cabang dari kalangan mahasiswa muda yang tidak terkait sama sekali dengan konflik internal PNI/FM di masa lalu.

Mengingat persoalan konsolidasi meliputi berbagai aspek, maka masalah yang sama dibahas pula dalam KONGRES VII GMNI di Medan tahun 1979. dalam Kongres VII ini kembali ditegaskan bahwa: Azas organisasi tidak boleh diubah, Independensi tetap ditegakkan, dan konsolidasi organisasi harus seimbang dengan konsolidasi ideologi.

Titik cerah bagi GMNI yang mulai bersinar di tahun 1979 ternyata tidak berlangsung lama. Intervensi kekuatan diluar GMNI, yang memang menginginkan GMNI lemah, dengan berpadu bersama 'interest pribadi' segelintir oknum pimpinan GMNI, telah mengundang malapetaka terhadap organisasi mahasiswa ini.

Kongres VIII GMNI yang sedianya akan diselenggarakan di Jogjakarta mengalami kegagalan karena diprotes oleh sejumlah cabang (Jakarta, Medan, Malang, Manado, Bandung, dan lain-lain), karena

tercium indikasi kecurangan untuk memenangkan aspirasi pihak luar dalam Kongres VIII itu. tetapi usaha filtrasi dan perlemahan GMNI tetap berlangsung sewaktu KONGRES VIII GMNI di Lembang-Bandung tahun 1982.

Hanya dengan pengawalan ketat dari aparat negara Kongres VIII tersebut bisa berlangsung, dan dimenangkan oleh segelintir oknum pimpinan GMNI tadi, namun dampaknya bagi organisasi sangat besar sekali.

Presidium GMNI hasil Kongres VIII terpecah-belah, dan disusul perpecahan berangkai semua cabang. Program Kaderisasi, regenerasi akhirnya macet total.

KONGRES IX GMNI di Samarinda tahun 1985 gagal menampilkan wajah baru dalam struktur kepemimpinan GMNI, disamping kegagalan dalam proses pembaharuan pemikiran seta operasioniil program.

Perpecahan ini akhirnya menjalar ke berbagai struktur organisasi dan mencuat dalam KONGRES X GMNI di Salatiga tahun 1989, yang diwarnai kericuhan fisik. Dampak dari kegagalan regenerasi dan kaderisasi Kongres X akhirnya hanya menampilkan wajah lama dalam struktur kepemimpinan GMNI.

Dan yang lebih menyedihkan lagi, para oknum pimpinan GMNI di tingkat Pusat terjebak dengan kebiasaan saling "pecat-memecat". Identitas sebagai organisasi perjuangan menjadi luntur, sebab yang lebih menonjol justru perilaku sebagai "birokrat GMNI". Untuk mempertahankan status quo, dan sekaligus untuk melestarikan budaya tadi, oknum-oknum pimpinan pusat mulai mengintroduisir apa yang disebut "Komunitas Baru GMNI" yang ditetapkan melalui deklarasi Jayagiri. Inilah cobaan yang terberat dihadapi GMNI. Sebab organisasi ini tidak hanya terperangkap dalam konflik kepentingan perorangan yang bersifat sesaat, tetapi juga mulai mengalami erosi idealisme, serta kegersangan kreativitas dan inovasi.

Secara nasional formal, kesadaran untuk memperbaiki arah perjuangan tampaknya belum muncul. Pada KONGRES XI GMNI di Malang tahun 1992, kejadian di Salatiga kembali terulang. Sementara suara-suara cabang yang menuntut otonomi semakin nyaring dan meluas.

Kondisi ini kemudian melahirkan format baru dalam tata hubungan antar kader pejuang pemikir-pemikir pejuang yakni: hubungan kejuangan yang bersifat personal-fungsional. Sebab hubungan formal-institusional tidak efektif lagi.

"Perlawanan" cabang-cabang kembali dilakukan di KONGRES XII GMNI di Denpasar Bali tahun 1995, tetapi keberhasilan hanya pada tingkatan materi program. Dimana kemudian dikenal dan dimunculkan

kembali di AD/ART mengenai Azas perjuangan "Sosialis Religius - Progressif Revolusioner" yang membuat banyak pihak terkejut-kejut, tetapi 'kekalahan' terjadi pada pertempuran perebutan pimpinan nasional yang kembali diwarnai oleh intervensi 'orang-orang lama' GMNI. Isu money-politics sangat kental di forum Kongres XII ini.

Disaat cabang-cabang kembali mulai menata diri, perpecahan kembali melanda Presidium hasil Kongres XII Bali, saling boikot dan intrik menjadi makanan utama sehari-hari di sekretariat pusat GMNI Wisma Marinda. Pada saat itu cabang-cabang tidak ambil pusing dengan tetap bergerak menguatkan garis ideologi yang mulai kurang tersentuh. Dimulai dengan dialog dan pembongkaran wacana mengenai Marhaenisme di Jogja dan kemudian dilanjutkan di Surabaya 14-17 Juli 1998. cabang-cabang semakin memantapkan hubungan dengan tidak menghiraukan perpecahan yang terjadi di tingkat pusat.

Ketika terjadi pergerakan massiv mulai Mei 1998, cabang-cabang dapat 'berbicara banyak' di tingkat kota masing-masing, tetapi tidak begitu halnya dengan GMNI di tingkat nasional. Perubahan politik di tingkat nasional rupanya semakin 'tidak menyadarkan pimpinan GMNI'. Perpecahan ini memuncak saat beberapa oknum pimpinan GMNI ikut mendaftarkan diri menjadi calon legislatif PDI Perjuangan. Cabang-cabang bereaksi keras dengan menarik dukungannya terhadap pimpinan nasional saat itu.

Kongres XIII GMNI yang sedianya dilaksanakan di Kupang-NTT mendapatkan protes keras dari cabang-cabang karena prosesnya yang tidak konstitusional dan penuh rekayasa; termasuk perilaku 'saling membubarkan' efek dari perpecahan Presidium. Akhirnya Kongres tersebut terselenggara dengan diboikot 19 cabang antara lain Medan, Bandung, Jogjakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Jember, Malang, Denpasar, Pontianak, Manado dll.

Perlawanan cabang-cabang atas tegaknya konstitusi GMNI terus diusahakan, lewat pertemuan-pertemuan antar Pimpinan Cabang di Malang, Surabaya, Jember, Semarang hingga Lokakarya Nasional GMNI di Solo Januari 2000 yang menghasilkan draft pemikiran pembaharuan GMNI untuk kembali ke azas Marhaenisme dan mencanangkan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) GMNI untuk menjembatani segala perpecahan yang ada.

KLB GMNI, Februari 2001, dipenuhi nuansa / keinginan untuk pembaharuan oleh DPC-DPC. Semangat itu terakumulasi lewat rekomendasi untuk "rekonsiliasi" dengan kelompok "kupang". Pelan tapi pasti, semoga GMNI tetap jaya....!!

Hubungan interpersonal antar aktivis GMNI di cabang-cabang semakin erat dan muncul kerinduan kembali akan "Nilai Dasar Perjuangan" yang selama ini ditinggalkan.

LDF

Left Democratic Force merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang gerakan, organisasi ini selalu inten mengkaji isu-isu yang sudah tidak berpihak pada rakyat. Organisasi ini lahir pada bulan mei tahun 2003 di kota Surabaya. Hal terpenting dalam organisasi ini adalah lembaga ini eksis dalam sebuah diskusi kaitannya dengan isu-isu hangat yang selalu up to date. Beberapa tokoh yang menggagas organisasi ini adalah teman-teman mahasiswa dari masing-masing kampus khususnya di Surabaya. Diantaranya adalah Oki Pratama (UNAIR), Zainul Arifin, Farid (UNMER).

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Proses Komunikasi Gerakan Mahasiswa

Setelah melakukan analisis terhadap isu yang akan diangkat pada saat aksi hal lain yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan strategi gerakan aksi itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme dan keadaan sosial pada zaman ini sangatlah berbeda dari masa-masa sebelumnya. Arus utama dalam pembacaan atas situasi penindasan tidak akan bisa dilepaskan dari sebuah era “globalisasi”. Karena di era inilah, sekarang ini kita hidup dan menghadapinya dengan segala ketidakpastian. Ilmuan yang mengkaitkan globalisasi dengan situasi penindasan.

Dengan berpijak pada tiga doktrin barat, yaitu liberalisasi (kebebasan dalam arti ekonomi), deregulasi (tidak adanya peraturan negara yang mengatur lalu lintas barang/jasa dan tidak ada subsidi bagi rakyat) serta privatisasi (swastanisasi, BUMN harus dijual kepada pihak swasta atau pemodal), neoliberalisme berjalan melewati setiap negara yang sudah tidak berdaya karena lilitan hutang luar negeri (HLN). Dengan tekanan HLN, inilah para negara door-kapitalis (Uni Eropa, USA dan Jepang) membuat peraturan-peraturan yang dipaksakan bagi negara dunia ketiga untuk meliberalisasi kehidupan ekonominya.

Lembaga-lembaga seperti *International Monetary Fund (IMF)*, Paris Club, CGI dan WTO menjadi sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja imperialisme dengan baju globalisasi. Setelah penghambat (peraturan Bea dan Cukai dan lain-lain) bagi perdagangan bebas sudah bisa dikendalikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara kapitalis mulai menancapkan kukunya di negeri ini. Pada saat inilah, budaya lokal dan aset kekayaan alam lainnya akan disedot habis oleh investor asing dan akhirnya kita menjadi terasing di negeri sendiri. Dan yang lebih parah, kita menjadi budak di negeri sendiri dengan upah yang sangat murah.

Dalam relasi penindasan demikian, masyarakat kita sebagian besar tersituasikan pada posisi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Petani tidak bisa menjual gabah dan padinya dengan

harga yang tinggi karena kalah bersaing dengan padi dari luar. Hal yang sama kita jumpai pada komoditas gula, buah-buahan dan barang keseharian lainnya. Dalam kondisi itu negara sudah tidak berdaya lagi karena tekanan dari Lembaga Donor untuk tidak memberikan subsidi pada rakyat. Kenaikan BBM, listrik dan telephon adalah imbas dari pemotongan subsidi demi pembayaran hutang. Demikian juga kenaikan biaya pendidikan juga bisa dilihat dari perspektif ini. UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah gambaran dari gelagat negara yang ingin melepas tanggungjawabnya atas subsidi pendidikan, sehingga membuka peluang terjadinya komersialisasidan kapitalisasi pendidikan. Persoalan bertambah runyam ketika pondasi perekonomian kita semakin lemah dan berimbas pada sektor tenaga kerja yang semakin kehilangan lapangan pekerjaan.

Dalam konteks semakin cepatnya laju dan arus globalisasi, kita malah secara politik masih sibuk dengan pertarungan kepentingan kelompok-kelompok elit yang sebagian besar tidak memihak rakyat. Pertarungan elit, baik di level eksekutif, legislatif maupun partai yang kadang di antaranya melibatkan kekuatan militer, akhirnya berimbas pada kehidupan sosial politik masyarakat yang terpecah belah. Separatiame, konflik berbasis SARA adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan sebagai imbas dari amburadulnya budaya politik di level negara. Di sisi budaya kita sedang digiring untuk menjadi orang yang tercerabut dari akar sejarah dan budayanya. Kita semakin bangga kalau

kita semakin Barat dan bisa meniru mereka pada sisi kehidupan yang sekecil-kecilnya. Kita tidak sadar sedang didorong untuk menjadi orang *konsumeris* untuk menjadi pelanggan dari pasar yang dibuka oleh orang barat. Watak ini dalam sejarah bangsa kita sering disebut dengan watak **inlander**.

Dari sekian pembacaan-pembacaan atas situasi penindasan dan situasi kemasyarakatan di atas, kita mencoba membuat sebuah pola umum untuk memudahkan membuat strategi perlawanan dan situasi-situasi apa saja yang harus dibuat. Untuk ini, perlu melihat tulisan Eman Hermawan (2001) yang membagi masyarakat dalam tiga lokus, yaitu : *Civil society* (masyarakat sipil), *political society* (masyarakat politik) dan *economical society* (masyarakat ekonomi).

Dalam setiap aksi yang dilakukan persiapan yang tidak kalah penting berikutnya adalah perangkat aksi dan perizinannya. Dikarenakan jika kita tidak mengurus perizinan maka aksi kita dapat dikatakan sebagai aksi yang illegal dan itu memiliki konsekuensi dari hukum yang berlaku, hal ini seperti apa yang dituturkan oleh Kholis LMND sebagai berikut:

“salah satu yang tidak boleh terlupakan pada saat aksi demonstrasi adalah yang pertama yaitu perizinan ke pihak kepolisian, walaupun pada saat dilapangan kita seakan-akan menjadi dua kubu yang saling berlawanan tapi dalam peraturannya kita harus memiliki izin tertulis dari kepolisian. Yang bertanggungjawab mengurus semua itu adalah korlap Aksi yang dipilih pada masa konsolidasi berlangsung, korlap juga bertanggungjawab mulai dari aksi dimulai sampai berakhir. Dan apabila ada dari pihak pers ingin mencari informasi maka korlap juga

yang harus menghandlenya karena informasi dari aksi harus satu pintu, supaya tidak terjadi kerancuan akan informasi yang diberikan. Sebelum aksi dilakukan terlebih dulu kita juga harus menyiapkan berbagai perangkat aksi yang akan kita bawa, contohnya yaitu semisal bendera komunitas atau organisasi, spanduk yang bertuliskan tuntutan, megaphone lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya, dalam mempersiapkan Keputusan aksi sebaiknya didiskusikan secara matang analisis SWOT-nya.. Selain itu perlu juga adanya pemanasan (warming up) dengan cara melatih yel-yel atau orasi untuk pencerdasan peserta aksi. Warming-up ini bertujuan untuk mensolidasi peserta aksi. Setelah kompak, solid, dan cerdas barulah aksi dimulai. Saat aksi, peserta wajib menghormati komando korlap dan turut menjaga keamanan aksi hingga aksi usai. Jika aksi disetting serius atau aksi bisu maka peserta harus menjauhkan dari kegiatan senda gurau dan ketidakseriusan. Seusai aksi, maka peserta harus mengadakan Evaluasi untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas aksi berikutnya. Tim humas juga memonitoring media untuk memantau keberhasilan blow-up media dan tingkat ke-bias-an tuntutan²⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa membuat atau setting sebuah aksi bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh mekanisme di dalamnya serta pembagian tugas yang tidak sedikit. Untuk bisa mengadakan aksi yang besar tentu saja juga mendatangkan massa yang besar pula, tapi untuk menjaga massa kita juga bukan hal yang mudah satu korlap didepan tidak bisa mengendalikan seluruh massa.

Grand issue layaknya menjadi faktor terpenting dalam melakukan aksi Demonstrasi, karena ini sangat berhubungan dengan pembentukan opini dan tuntutan kita. Grand issue yang terbangun juga menentukan aksi kita mau diarahkan kemana, dalam arti lain target dari aksi ini ditujukan kepada siapa, pejabat daerah atau pejabat pusat.

²⁹ Wawancara dengan Kholis LMND pada tanggal 03 April 2012

Beberapa sentral aksi di Surabaya yakni seperti kantor Walikota atau yang biasa disebut warga Surabaya sebagai Grahadi, kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan kantor Gubernur Soekarwo, DPRD Kota Surabaya, serta DPRD Jawa Timur. Tempat-tempat ini yang sering kali sebagai tempat tujuan aksi di kota Surabaya.

Dalam melaksanakan sebuah aksi scenario berjalannya aksi mulai dari awal sampai akhir harus juga disiapkan, dikarenakan ketika aksi tidak sesuai lagi dengan settingan awal maka korlap bisa langsung mengambil alih dan mengkondisikan kembali massanya. Sebab apa yang terjadi di lapangan tidak dapat kita prediksi. Ketika ada provokasi dari pihak luar maka aksi kita akan menjadi amburadul. Maka dari itu sebelum aksi dimulai terlebih dahulu seuruh massa aksi diberitahu tentang format aksi yang akan dilancarkan. Hal ini penting dikarenakan jika ada Chaos atau bentrok ketika aksi maka para massa aksi kita sudah bersiap-siap. Rata-rata aksi yang diadakan untuk menuntut sebuah perubahan kebijakan memang disetting Chaos, akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini adalah kebanyakan di pemberitaan media penyebab bentrok selalu mahasiswa. akan tetapi sebaliknya kenyataan yang sebenarnya di lapangan pihak aparat yang selalu memprovokasi massa. Bahkan pada aksi gabungan pada tanggal 29 Maret kemarin Kapolrestabes Sendiri yang memerintahkan untuk menyerang mahasiswa agar aksi segera bubar. Tentu saja dengan satu

komando dari atasan pasukan kepolisian langsung memukuli mahasiswa dengan tongkat kayu yang mereka pegang, bahkan acapkali mereka menodongkan senjata laras panjangnya juga ke arah pendemo. Protap seringkali diterapkan tidak pada tempatnya, tapi ketika massa aksi yang kami bawa ini melampaui jumlah petugas yang berjaga maka tidak satupun dari mereka yang berani menyerang kami.

Disetiap aksi yang dibuat harus ada pembagian tugas secara menyeluruh agar aksi berjalan dengan lancar. Pembagian tugas ini diberikan sesuai dengan kemampuan dari massa aksi yang ditunjuk, mulai dari Korlap beserta asternya, setelah itu yang memiliki suara yang lantang diposisikan sebagai orator dan agitator, yang memiliki kemampuan untuk berdiplomasi diberi tanggung jawab sebagai negosiator, dan yang bertugas menjaga supaya massa aksi tetap ada di barisan yakni sebagai Security atau border. Serta yang tak kalah penting adalah di bidang humas yakni yang juga bertindak sebagai juru bicara aksi. Pemberitaan di media bisa jadi berbeda dengan kenyatannya jika juru bicara aksi tidak bertindak sesuai scenario yang telah di tetapkan. Media menjadi sangat penting Karena yang melihat aksi kita di jalanan mungkin hanya beberapa orang saja sedangkan media memberitahu jutaan mata di seluruh penjuru negeri. Jadi jika yang diberitakan tidak sesuai maka yang diketahui banyak orang juga merupakan sebuah kesalahan. Jadi dapat digaribawahi disini bahwa

media juga memiliki peranan sangat sentral dari setiap aksi yang dijalankan.

Dalam menjalankan setiap aksinya mahasiswa memang selalu memilih tempat-tempat yang dianggap sentral agar suara mereka di dengar oleh para penguasa yang ada dibalik pagar. Terkadang memang ada forum dialog dengan pihak pemerintah akan tetapi hal itu jarang sekali menampilkan hasil, aspirasi kami hanya di dengar setelah itu disimpan jadi tidak ada sama sekali langkah kongkrit dari pemerintah dalam penyelesaian masalah rakyat. Tidak tahu apakah memang kerjaan mereka terlalu banyak atau memang pada dasarnya mereka tidak pernah mengurus nasib rakyat. Seperti apa yang dikatakan oleh basuki SPI sebagai berikut:

“..... sebenarnya yang membuat bentrok duluan itu yang membuat ulah pihak aparat. Kita sedang orasi tapi mereka menyuruh kita hanya orasi di trotoar saja, padahal yang kita inginkan cuma aspirasi kita supaya di dengar, dengan bersenjatakan perisai dan pentungan mereka terus menyuruh kami agar segera minggir dari badan jalan. Hal ini memang sengaja mereka lakukan agar terjadi bentrok dan aksi yang kita lakukan agar cepat selesai, tidak jarang kita juga sering ditodong dengan menggunakan senjata mereka. jadi jelas bahwa aparat digunakan dengan cara yang sangat represif oleh penguasa untuk menghabisi mahasiswa. bom-bom gas air mata juga sering menghinggapi tubuh kami. Yah kalau Negara ini sudah tidak mau dikritik lagi mending langsung saja ganti ke model kerajaan jangan memakai demokrasi di negeri ini. didalam diri kita tidak ada keinginan sampai terjadi kerusuhan ketika mengadakan aksi. Tapi pihak aparat selalu memposisikan kita sebagai musuh ketika aksi itu dimulai. Jadi ketika Negara ini diejek oleh Negara lain tidak ada yang mau bergerak untuk mempertahankan harga diri bangsa, akan tetapi ketika berhadapan dengan pihak mahasiswa, sampai kendaraan perang seperti mobil barakuda juga disiapkan untuk menumpas aksi mahasiswa. hal yang sama juga pernah terjadi pada saat kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa. dan kematian itu disambut riang

gembira oleh para aparat keamanan, dalam pandangan mereka seakan-akan telah membunuh musuh Negara. Keagresifan itu tidak lepas dari komando langsung presiden pada saat itu, yang juga berasal dari dunia militer. Agresifitas yang ditunjukkan tak ubahnya seperti strategi militer dalam mengalahkan lawannya.³⁰

Pasca kerusuhan Mei 1998 pun Negara ini masih belum menemukan bentuknya yang sempurna. Betapa tidak pengulangan kebijakan pada masa awal orde baru kembali diterapkan pasca reformasi yakni dengan cara memasukkan sebagian besar para aktivis 1998 kedalam parlemen sehingga gerakan aksi mahasiswa pasca itu benar-benar mati sampai sekarang. Monopoli politik yang begitu besar di Negara ini mungkin saja tidak bisa dibunuh secara permanen. Kekhawatiran akan presiden dari pihak militer sebenarnya sudah banyak merebak ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketakutan ini bukan tanpa alasan dikarenakan pada masa sebelum ini 32 tahun bangsa Indonesia bagaikan dibawah garis kolonialisme untuk yang ketiga kalinya setelah Belanda dan Jepang, hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Cona KamusPR³¹:

Pada saat pertama kali SBY mencalonkan diri sebagai presiden sebenarnya sudah ada kekhawatiran diantara internal kampus bahwa SBY ini akan mengulangi masa Soeharto, banyak sekali kepentingan-kepentingan rakyat yang dikorbankan hanya untuk manuver politik dia saja. Dan kejahatan di wilayah dunia kampus pun kembali terulang dengan dikeluarkannya Undang-undang badan Hukum Pendidikan yang merupakan bentuk lepas tangannya pemerintah terhadap dunia pendidikan, akibat dari undang-undang tersebut semua instansi

³⁰ Wawancara dengan basuki SPI pada tanggal 04 April 2012

³¹ Wawancara dengan cona kamus PR pada tanggal 10 April 2012

pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi harus memenuhi biayanya sendiri. Alhasil masing-masing diantara mereka saling berebut menjadikan diri mereka yang terbaik dengan menggunakan dalih sekolah berstandar internasional dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak dari golongan menengah kebawah tidak akan pernah lagi menikmati pendidikan yang setara, mereka para kaum miskin memang ada dana BOS tapi di masing-masing sekolah ada stratifikasi didalamnya dengan diidentifikasi ada murid regular dan murid standar internasional. Dalam dunia kampus biaya SPP setiap tahunnya juga semakin naik, hal ini sama dengan kampus-kampus swasta jadi sudah tidak ada perbedaan lagi diantara keduanya. Belum lagi biaya hidup yang ditanggung oleh mahasiswa. hal ini yang menyebabkan mahasiswa akan cenderung apatis terhadap wilayah aktivisme kampus. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana lulus dengan cepat, metode seperti ini sebenarnya sama dengan pemberlakuan NKK/BKK tapi dengan cara yang lebih halus, yang mana NKK berfungsi untuk menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa [dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah].” Dalam kebijakan NKK, politik dibedakan ke dalam tiga pengertian yaitu politik dalam arti konsep (concept), dalam arti kebijakan (policy), dan dalam arti arena percaturan (politics). Politik dalam arti konsep berarti mengajukan gagasan, pikiran, interpretasi mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Pengajuan gagasan ini lengkap dengan pencantuman program aksi dan tujuan yang hendak dicapai melalui program tersebut serta bagaimana cara yang dipakai. Dalam rasionalisasinya atas NKK, pemerintah berkeinginan melatih mahasiswa untuk berpikir konseptual-teoritik dan sistematis. Politik dalam artian policy mengeksplisitkan bentuk-bentuk tindakan nyata individu atas masalah masyarakat ataupun negara. Sementara politik dalam artian ketiga, yaitu sebagai arena, merupakan media di mana masing-masing individu atau kelompok yang punya konsep dan kebijakan, saling bertarung satu sama lain, di mana masing-masingnya memiliki sasaran, kepentingan, ide, bahkan ideologinya sendiri-sendiri. Dari tiga arti politik yang dimaksudkan pemerintah ini, maka satu-satunya pengertian yang boleh diterapkan mahasiswa hanya dalam arti pertama, yaitu ‘konsep.’ Hak politik yang diberikan kepada mahasiswa sebab itu hanyalah memperbincangkan masalah politik dalam lingkup ‘tembok’ kampus dan tidak untuk dioperasionalkan ke masyarakat, apalagi membangun gerakan dalam bentuk protes demonstratif. Kebijakan NKK yang merupakan kesinambungan dari keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa, lalu juga diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Kampus (BKK) sebagai operasionalisasinya. Dengan bekunya Dewan Mahasiswa, maka perangkat yang menjadi wahana aktivitas mahasiswa menjadi tidak ada lagi, dan digantikan BKK. maka dari itu pada essensinya SBY

sebenarnya lebih mematikan dua kali lipat dari pada pada zaman Soeharto maka dari itu kami disini dan semua aliansi menuntut bagaimana caranya agar SBY turun dari jabatan Presidennya.

Dalam segi strategi politik yang digunakan tampaknya SBY dua kali lebih cerdas dari soeharto. Dengan bermodalkan separuh lebih anggota partai yang duduk di kursi parlemen serta pasukan koalisi yang sangat banyak, membuat segala kebijakan presiden yang masuk ditataran sidang paripurna tidak menemui kendala apapun. Kasus bank century menjadi bukti nyata dan jelas lepasnya para pencair dana fiktif yang ujung dari aliran dananya sampai sekarang belum jelas keberadannya. Back up dari kelas penguasa terbukti bisa melepaskan semua tersangka dari jeratan hukum walaupun yang menginspeksi sekelas anggota DPR. Bahkan salah satu diantaranya jadi salah satu direksi bank dunia.

Hal yang sama juga terjadi pada saat pengesahan UU BHP, berulang kali mahasiswa turun kejalan tapi tidak ada respon sama sekali, dan apa yang ditakutkan benar-benar terjadi ketika tiap tahunnya biaya pendidikan semakin mahal. Di kalangan civitas akademika kampus orientasi mahasiswa kembali hanya terfokus kepada pencapaian hasil belajar saja pada titik ini apatisme mahasiswa sudah mulai muncul dan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dari mereka sendiri.

Walaupun terpilih dua kali berturut-turut tapi anggapan kalangan mahasiswa terhadap presiden SBY ini masih sangat miring. Dikarenakan yang dia utamakan adalah membangun citra dirinya sendiri. Tapi dia tidak membangun sama sekali citra bangsa sebagai identitas dari warga Indonesia. Berapa kali sudah kebudayaan kita diklaim oleh Negara tetangga sebagai kebudayaan mereka berbagai provokasi dari pihak Malaysia sering kali dilancarkan kepada Negara kita, akan tetapi kita hanya terdiam dan membisu dan seakan-akan menutup mata akan semua itu. Senada dengan hal ini Birul SMI mengatakan bahwa:

“..... Negara ini adalah Negara yang besar tapi besarnya Negara ini tidak diimbangi dengan keberanian yang besar juga, jangankan manusia pulau-pulau yang ada di dalam kekuasaan Indonesia pun sudah tidak mau lagi bersatu dengan Negara penggalan surga ini. sudah berapa pulau yang terlepas dari Negara ini, kekayaan yang tak ternilai menjadikan Negara ini lalai dalam menjaga kekayaan tersebut, dua gunung emas yang ada di papua kini juga telah habis dan keuntungannya dibawa pergi ke negeri orang, ironisnya rakyat Indonesia yang disana masih bertahan dengan kotekanya, ketika buruh Freeport menuntut keadilan atas gaji yang mereka terima, disaat sebenarnya mereka mengambil emas dari tanahnya sendiri tapi mereka dibayar sangat sedikit dibanding pekerja di Negara lain, toh apa tindakan presiden berikutnya, pertanyaannya dia SBY membela Freeport atau lebih membela rakyatnya, dan jawabannya sepertinya sudah bisa ditebak yakni dia lebih membela 1% keuntungan emasnya daripada nasib rakyat yang ada disana. Menjaga materi Negara sudah gagal ditambah dengan kegagalan dalam mempertahankan kebudayaan bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia sadar tentang kebodohan pemimpinnya mungkin mereka semuanya malu menyematkan nama Indonesia di dada mereka. belum selesai semua kasusnya para elit politik kita justru sedang berlomba-lomba dalam mengkorupsi uang rakyat. Disaat yang bersamaan pula kesadaran mahasiswa sebagai *agen of change* sudah menurun eksistensinya, yang bisa saya lakukan dan teman-teman yang ada disini hanya turun ke jalan dan berharap serta berdoa mata hati mereka bisa dibukakan agar bangsa ini bisa

menjadi lebih baik lagi. Regulasi tentang batas dua kali menjadi presiden memang merupakan penghindaran dari terciptanya suatu rezim baru, akan tetapi jika aktor intelektualnya tetap orang yang sama maka sama saja untuk saat ini dan selamanya kita akan hidup dalam papan catur permainan mereka.³²

Dewasa ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa sama halnya dengan sekolah SMA atau SMP kampus pun juga saling berlomba-lomba untuk menwarkan kalau dirinya yang terbaik. Bukan karena alasan ketika pemerintah lepas tangan sepenuhnya terhadap dunia pendidikan maka cara satu-satunya adalah memperoleh mahasiswa sebanyak-banyaknya agar pemasukan mereka juga besar, yang otomatis biaya perkuliahannya pun juga semakin melangit. Hal inilah yang menjadi penghambat terbesar bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tapi selalu terbentur dengan biaya. Pada akhirnya yang bisa masuk bangku kuliah mereka anak-anak kaum borjuis yang sama sekali tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat-rakyat yang sedang tertindas. Mereka yang golongan menengah kebawah harus rela menggantungkan cita-cita ingin berpendidikan tinggi dan dialihkan untuk bekerja saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah mereka mau bekerja sebagai apa? Paling banyak terjadi para lulusan SMA ini pasti memilih dunia industry sebagai alternative terakhir untuk mendapatkan sebuah penghidupan yang baru.

³² Wawancara dengan Birul SMI pada tanggal 05 April 2012

Bukan sesuatu yang baru kiranya ketika mereka sudah terjebak di dunia industry yang mereka dapat adalah hidup yang monoton, tanpa mereka sadari masa-masa produktif mereka telah selesai begitu saja, dan kehidupan mereka tidak mengalami perubahan sedikitpun. Adapun yang bisa sukses maka prosentasenya Cuma sekitar 1:1000. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adit dari GMNI:

Kelesuan dunia kampus dewasa ini bukan tanpa sebab, orientasi akan kemampuan hasil lulusan sekarang menjadi faktor utama yang mereka kejar. Universitas mana yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas maka itu yang paling digemari. Mahasiswa dituntut untuk membayar biaya perkuliahan yang lebih tinggi, dikejar SKS dan dipaksa memperoleh IPK yang tinggi, karena jika tidak apa yang mereka inginkan dari awal tidak akan tercapai. Ketika konsentrasi mereka hanya berfokus pada perkuliahan saja, ajakan untuk membela kepentingan rakyat dan teriakan untuk turun ke jalan hanya sebagai tontonan saja bagi mereka. Kita yang masih mencari keadilan untuk rakyat Indonesia ini dikatakan sebagai orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ketika kita mengadakan aksi di jalanan bukan dukungan yang kita dapat malahan cemoohan yang selalu menghampiri kita yang dikatakan masyarakat sebagai faktor utama penyebab macetnya jalanan Surabaya. Mereka tidak sadar dibawah sengatan terik matahari dan panasnya aspal dibawah kaki, kita berteriak untuk membela hak-hak rakyat yang diambil paksa oleh pemerintah untuk kepentingan pribadinya saja. Tiap kali kita selesai aksi maka banyak diantara teman-teman mahasiswa kita bertanya “dapat apa kalian aksi tadi?” sesungguhnya pertanyaan yang sangat substansial tapi juga ada nada ejekan. Karena terkadang di setiap akhir dari aksi yang kita lakukan lagi-lagi kita juga mempertanyakan apakah teriakan kita tadi masih bisa terdengar oleh para penguasa.³³

Hal yang sebenarnya menjadi inti dari semua ini adalah apa yang kita rasakan tak ubahnya hanya sebagai perulangan pada zaman dulu. Bangsa ini tetap stagnan ditempatnya berdiri sejak pasca kemerdekaan lalu. Kita terus menerus terjebak dalam permainan

³³ Wawancara dengan Keceng GMNI

politik dari pihak penguasa, segala bentuk kebijakan yang dibuat dan keputusan yang diambil pasti tidak terlepas dari kepentingan golongan masing-masing, jika sistem perpolitikan tidak berhenti di wilayah pemilu dan terus dilakukan sampai pada saat dia menjabat maka apa jadinya Negara ini. bukan rakyat lagi yang difikirkan melainkan bagaimana mereka bisa menang di pemilu mendatang.

Sungguh ironis memang ketika rakyat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, memang pada manifestonya kita adalah Negara demokrasi akan tetapi pada kenyataannya kita ini sebenarnya Negara Monarkhi Absolut. Kita bisa lihat dipemerintahan kita ketika eksekutif dan legislative sudah dikuasai oleh golongan tertentu maka hal ini sama saja tidak ada keduanya karena mereka saling jalan beriringan dan saling mendukung kebijakan antara yang satu dengan yang lain. Bagaikan dalam drama-drama dalam pentas teater mereka seakan-akan memainkan peran-peran yang berbeda padahal disutradarai oleh orang yang sama. Kebohongan public disebar dimana-mana, masa kampanye pemilihan merupakan saat yang paling tempat untuk mengobrol janji dan slogan-slogan yang membangun akan tetapi tidak pernah menemui titik temu antara keduanya, hal ini senada dengan komentar yang diucapkan oleh Amar LDF Surabaya bahwa;

Perihal yang selama ini kita dengar dari pemerintah tak ubahnya hanya sebatas pencitraan dan kebohongan public semata. Nasib rakyat dibuat sebagai alat politik untuk mendapatkan simpati dari rakyat, kasus terkuat yang menopang semua itu adalah permainan harga BBM pada tahun 2007 menjelang pemilihan presiden berikutnya, pada saat itu kita

memang sedikit banyak terdiam dikarenakan saya kira memang kondisi Negara pada saat itu sedang krisis sampai pada saya mengetahui fakta bahwa pola kenaikan dan penurunan BBM sudah di setting sebelumnya. Apalagi rakyat kecil kita disuap dengan menggunakan BLT(bantuan langsung tunai), dan hal itu juga yang mereka gunakan sebagai senjata dalam kampanye-kampanye mereka berikutnya. Dengan jargon presiden yang bisa menurunkan harga BBM dan pemberian BLT menjadikan itu sebagai senjata yang ampuh dalam menaklukkan hati rakyat yang tidak tahu menahu soal perpolitikan.dan ketika hal itu akan terulang lagi pada tahun 2012 ini saya orang pertama yang menentang keras hal itu, karena pada saat ini juga akan mendekati proses pemilu pada tahun 2014 jika kita tidak segera bergerak maka hal yang sama akan terjadi lagi untuk kedua kalinya dan lagi-lagi nasib rakyat yang dijadikan tumbal akan semua ini. dapat kita lihat dengan jelas ketika pembahasan masalah kasus ini berlangsung banyak diantara mereka para partai politik saling berebut simpati rakyat. Mengatasnamakan diri mereka yang terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Tapi segala tipu daya ini tidak akan berhenti sampai sini. Tidak hanya elemen mahasiswa para kaum buruh pun juga bersatu dalam mengadakan aksi demonstrasi mulai tanggal 26 sampai 31 maret tahun 2012. Meskipun tidak semuanya murni atas nama rakyat banyak diantaranya juga yang ditunggangi oleh partai-partai oposisi yang memang pada eksistensinya selalu memposisikan diri kontra dengan pemerintahan.³⁴

Pada akhir bulan maret itu seakan-akan seluruh jalan di pusat kota Surabaya tidak lagi digunakan sebagai jalan untuk mobil melainkan untuk jalan kaki ribuan massa aksi yang memadati beberapa titik sentral yang ada di Surabaya yakni di Grahadi, Kantor DPR Kota Surabaya, Kantor PEMPROV Jatim serta Kantor DPRD Jatim. Beberapa tempat itu yang menjadi pusat aksi selama akhir bulan maret itu. Dan hal ini juga dijawab dengan ribuan aparat yang menjaga lokasi-lokasi tersebut disertai dengan pagar kawat berduri dan berbagai perisai dan senjata di tubuh mereka. kota Surabaya pada saat itu seperti mengulang pada tanggal 10 November pada masa pasca kemerdekaan

³⁴ Wawancara dengan Amar LDF Surabaya pada tanggal 06 April 2012

baku hantam antara pendemo dan pihak aparat tidak terelakkan lagi, pada setiap massa aksi yang datang pasti terjadi bentrok disana, seperti penuturan dari Faizal Mahzan PMII”

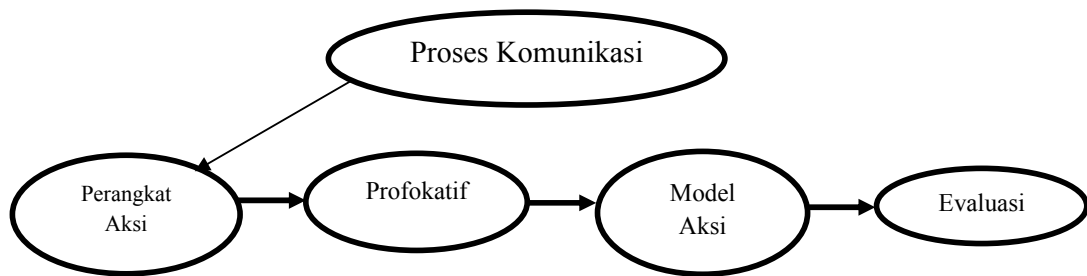
“kami memang memilih tanggal 28 Maret sebagai hari untuk aksi PMII se Jawa timur, karena jika kita melaksanakan aksi pada tanggal 27 kita akan berbarengan dengan massa aksi dari PDI Perjuangan yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini kita lakukan agar masa aksi kita terhindarkan dari pandangan orang bahwa kita memblok pada salah satu partai oposisi. Kita memilih melakukan aksi di DPRD Jatim karena menurut kami itu adalah tempat yang strategis dan mengingat bahwa kantor perwakilan rakyat Jawa timur juga ada disana. Kedatangan kami sama seperti yang lainnya yaitu disambut dengan ratusan aparat juga dengan bersenjata lengkap, massa aksi kita pada saat itu sekitar 500 orang karena memang kita mengerahkan kader PMII se Jawa timur, kita menggunakan kendaraan truck dan sebagian lainnya menggunakan motor. Ketika aksi sedang berjalan begitu banyak aksi-aksi provokasi yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian, sampai pada mereka menembakkan gas air mata kedalam truck yang di dalamnya terdapat wanita juga, banyak yang pingsan atas kejadian itu, dan hal ini juga menyulut emosi sekian banyak massa aksi yang ada disana dan bentrokpun tidak dapat dihindari lagi.³⁵

Memang pada akhir bulan itu kondisi kota Surabaya sangat mencekam. Disemua pinggir jalan utama pasti ada penjagaan dari pihak kepolisian. Hal ini semua dilakukan hanya untuk satu hal yakni agar supaya rakyat tidak dipermainkan lagi, dan tidak dijadikan tumbal atas manuver-manuver politik yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada akhirnya harga BBM tidak jadi naik dan ini semakin jelas bagi kami, jika kita tidak mengadakan aksi besar-besaran seperti di akhir maret maka hal yang sama seperti pada tahun 2007 akan terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi nasib rakyat yang akan terus

³⁵ Wawancara dengan Faizal Mahzan PMII pada tanggal 06 april 2012

dipakai taruhan atas segala kebijakan yang sangat syarat dengan kepentingan golongan didalamnya.

Bagan Proses Komunikasi Gerakan Mahasiswa



2. Deskripsi Pola Komunikasi Gerakan Mahasiswa

Dalam dunia pergerakan gagasan akan perubahan struktur yang tidak membela kepada rakyat merupakan hal yang harus ada dan diperjuangkan. Sudah banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para kaum muda kita yang dalam penelitian ini saya menggarisbawahi adalah para mahasiswa yang dewasa ini sudah mulai dipertanyakan bentuk eksistensi dari jati diri mereka.

Rekam jejak perjuangan perlawanan terhadap pemerintah ini tidak sekali dua kali dilakukan. Selalu dalam bentuk oposisi pada pemerintahan siapapun merupakan ciri khas dari massa terdidik ini. melakukan controlling dan kritik tanpa memiliki kepentingan politis adalah bentuk eksistensi mereka, dikarenakan sekali mereka turun ke

jalan maka identitas yang tersemat di dada mereka adalah sebagai rakyat Indonesia.

Hanya dengan bermodal semangat dan impian bisa melepaskan ketertindasan rakyat dari pemerintah saja yang menjadi bahan bakar mereka dalam melakukan setiap aksi di Surabaya. Berhadapan langsung dengan barikade polisi dan pagar berdurinya, belum lagi masih ditambah dengan sabetan tongkat dan pukulan dari aparat ketika mereka menganggap salah satu kelompok aksi melakukan suatu provokasi. Jalan utama pun dijadikan sebagai sarana bagi para masa aksi agar suara yang mereka teriakkan sedikit di dengar oleh para telinga tebal yang sedang duduk nyaman di kursi panas mereka masing-masing.

Berjalan menyusuri titik-titik pusat kota layaknya sebuah perjalanan ke medan perang sudah menjadi hal yang biasa bagi para mahasiswa ini. berpacu dengan teriknya sinar matahari dan asap kenalpot yang lebih banyak terhirup daripada udara itu sendiri menjadi bumbu dalam perjuangan mereka mengentaskan penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada sepeserpun uang yang mereka terima hanya segelas air mineral dan sebungkus nasi putih sebagai ganjalan perut yang menjadi penyambung nyawa mereka, karena pada saat itu kita semua sadar kalau kita sedang membela rakyat bukan para eksekutif ataupun kroni-kroninya yang menganggap nasib rakyat Indonesia adalah sesuai permainan catur, dimana rakyat diposisikan sebagai

bidaknya, sehingga ketika kebijakan atau keputusan itu gagal maka tidak akan berimbas pada kehidupan mereka.

Dalam setiap moment peringatan hari besar bagi rakyat yang tertindas kajian terhadap isu-isu yang berkembang terus dilakukan dalam menemukan sebuah tolak ukur apakah hal yang kita aspirasikan ditanggapi oleh para penguasa kita. Termasuk didalamnya ketika memperingati hari tani, hari buruh, hari kebangkitan nasional, hari kesaktian pancasila dan lain sebagainya. Semua upaya itu dilakukan agar para penguasa paham bahwa rakyatlah yang merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah, dan jangan sampai bangsa yang direbut kebebasannya dengan tebusan nyawa ini kembali menjajah para pejuang-pejuangnya.

Dalam melakukan aksi demonstrasi pada umumnya para mahasiswa membentuk sebuah aliansi-aliansi yang berfungsi sebagai penggalangan massa yang merasa sepenanggungan dan memiliki cita-cita yang sama. Kelompok-kelompok ini bersifat sangat kondisional, jadi kelompok yang mereka buat jika memiliki anggota yang tetap maka sistem pengkaderan akan terus berlanjut, akan tetapi yang paling banyak terjadi bahwa aliansi ini menjadi satu dan besar ketika mereka tergabung bersama.

Sebelum melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan yang memerlukan waktu setidaknya lebih dari 2

minggu untuk menyiapkan segala persiapan yang harus dipenuhi agar aksi bisa berjalan maksimal, hal pertama yang harus dilakukan adalah konsolidasi, atau menjalin ikatan sesama mahasiswa baik yang ada di dalam satu kampus atau lintas kampus di Surabaya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ilham Irfani selaku ketua Left Democratic force Surabaya:

“Hal terpenting dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah adalah dengan memiliki jaringan seluas-luasnya. Dikarenakan jika kita tidak memiliki basis massa yang kuat pasukan yang kita miliki akan dengan mudah ditumbangkan oleh aparat yang menjaga aksi, dan pesan kita pun akan sulit mendapat perhatian oleh pemerintah. Untuk aksi-aksi memperingati sesuatu yang sifatnya hanya merupakan control akan kebijakan mungkin gak masalah kita turun ke jalan dengan massa aksi sedikit, tapi jika kita memiliki suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kita perlu menggalang massa sebanyak mungkin sebagai bentuk gambaran rakyat Indonesia yang menolak akan kebijakan itu. Anggaplah sebuah contoh kasus kenaikan BBM yang kemarin dari LDF sendiri menurunkan tak kurang dari 200 peserta aksi ke jalan untuk menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM dan memaksa supaya SBY turun dari kursi presidennya karena sudah kami anggap dia gagal. Dalam melakukan masa konsolidasi ini jaringan komunikasi sangat penting, dari komunitas satu ke komunitas lain saling memberi informasi dan meminta kejelasan mereka bagaimana menentukan sikap dalam kasus yang sedang diangkat. Setelah itu baru diadakan pertemuan intens sampai pada hari pelaksanaan aksi. Ada salah satu alasan kenapa mahasiswa dijadikan sebagai tonggak akan perubahan di negeri ini. dikarenakan agenda yang mereka perjuangkan sangat populis, dan realistis. Mahasiswa lah yang bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap rezim tiran. Mahasiswa-lah yang bisa mengawal reformasi hingga ke titik tujuan. Rakyat menaruh harapan atas kekuatan intelektual dan kekuatan aksi yang mahasiswa miliki.”Jadi, pahami dirimu dan sekitarmu, dan mari kita bergerak lagi ! Reformasi belum usai” Dengan kekuatan intelektual di atas rata-rata masyarakat awam, mahasiswa memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi wacana dan peristiwa dalam lingkup lokal hingga internasional. Begitu juga dengan kemudahan akses literatur ilmiah dan gerakan-gerakan pemikiran, yang pada tujuan akhirnya akan menentukan ideologi atau sistem hidup yang akan dijalaninya. Buku yang ia baca, informasi yang

ia terima, tokoh-tokoh yang ia ajak bicara, adalah beberapa faktor utama yang kelak sangat berpengaruh terhadap idealisme hidupnya. Selain kekuatan intelektual yang identik dengan aktivitas ilmiah, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menguatkan potensi kepekaan sosial politiknya. Disebut kepekaan sosial karena mahasiswa pada dasarnya adalah bagian dari rakyat. Apapun yang terjadi pada rakyat maka mahasiswa akan turut juga merasakannya.³⁶

Jelas dapat kita lihat disini bahwa dalam melakukan konsolidasi banyak sekali elemen yang tergabung didalamnya. Otomatis hal ini menyebabkan heterogenitas yang sangat beragam didalamnya. Lagi-lagi peranan mahasiswa menjadi sangat sentral disaat ada kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Tanpa dikomando mereka langsung mengadakan konsolidasi dan merancang upaya untuk membela rakyat. Mahasiswa dengan segala aktivitas akademisnya dikampus diharap mampu untuk mengimbangi scenario-skenario yang dibuat pemerintah untuk mengelabui rakyat. Banyaknya buku dan pengetahuan yang ada membuat perspektif yang mereka miliki lebih luas, serta idealisme yang masih murni sedikit banyak akan menghindarkan mereka dari kepentingan dan tendensi dari pihak lain.

Tahapan selanjutnya adalah mengkaji isu-isu yang ada serta melakukan analisis yang mendalam terhadap isu-isu tersebut. Dikarenakan jika tidak dikaji secara mendalam kita akan terjebak dengan isu-isu permukaan atau isu pengalih dan tidak menemukan masalah sentralnya, hal ini sering kali terjadi jika sedang ada isu besar di expose secara besar-bearan pula oleh pihak media, seringkali media

³⁶ Wawancara dengan Ilham Irfani LDF Surabaya pada 02 April 2012

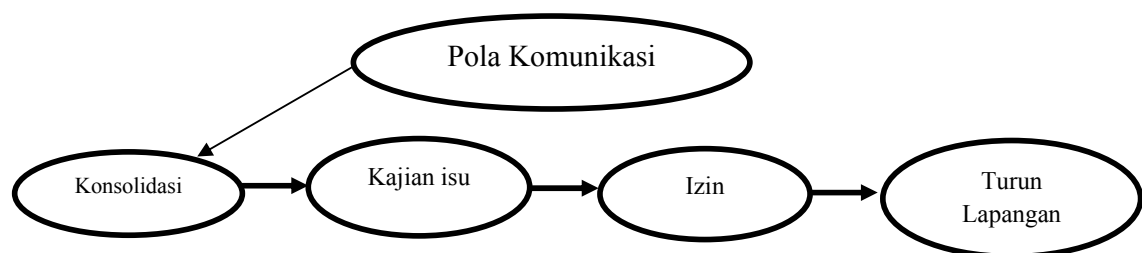
menjadi pisau bermata dua, ketika mereka membongkar sisi jelek dari pemerintahan, itu akan membuat kita tersadar akan bobroknya pemerintahan yang ada di Negara kita, tapi jangan lupa bahwa media juga sebuah perusahaan yang juga mencari keuntungan di dalamnya. Terkadang para penguasa menggunakan media untuk memunculkan isu lain untuk menutupi isu yang mereka anggap berbahaya, kita ambil contoh pada kasus BBM kemarin, ketika sedang hangat-hangatnya di bicarakan ternyata ada yang mengalihkan isu ini ke isu binatang Tomcat yang menyerang wabah. Tidak ada dalam sejarah ketika isu wabah serangga seperti ini masuk dalam KLB atau kejadian Luar Biasa, sampai presiden pun angkat bicara. Hal ini yang menyebabkan masyarakat terkecoh dan tidak lagi focus dengan kebijakan public yang sesang berlangsung. seperti halnya yang diungkapkan oleh Iqbal dari SMI

“.....Walaupun kita dah bisa menggalang massa yang banyak pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa menyatukan mereka semua pada satu pemikiran mengingat mereka juga dari latar belakang kampus dan jurusan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu hal ini yang memakan waktu paling banyak biasanya kita lakukan sampai 4 hari berturut-turut untuk mendapatkan kata sepakat dan supaya kita terbebas dari tendensi pihak manapun. Kajian isu yang kita lakukan dengan cara masing-masing ketua komunitas menyampaikan pengetahuan mereka mengenai isu yang sedang dikaji setelah itu kita gabungkan dan mengambil sebuah keputusan bersama isu mana yang diangkat dan dijadikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Hasil dari kajian dan analisis isu ini pada akhirnya dijadikan sebagai press rilis dari aksi demonstrasi dan menjadi sumber data untuk orasi yang akan dilakukan selama aksi. Setelah itu ada Proses pbingkaiian (framing) merupakan proses konstruksi makna dalam gerakan sosial dimana berbagai macam peristiwa (occurrences) dan realitas yang terkait dengan gerakan disederhanakan dan dipadatkan

dengan tujuan memobilisasi adherents dan konstituen potensial, memperoleh dukungan dari by stander, serta mendemobilisasikan antagonis. Proses ini akan menghasilkan bingkai aksi kolektif yang akan memberikan label dan identitas khusus pada gerakan mahasiswa yang akan kita lakukan dalam semesta gerakan yang ada. Proses pembingkaiian pada dasarnya meliputi proses diaknosa, untuk mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi penyebab masalah; prediksi (prognostis framing), untuk mendefinisikan target, strategi dan taktik untuk memecahkan masalah; serta justifikasi (motivation framing), untuk membangun pembenaran bagi tindakan tersebut.³⁷

Pada hakikatnya masa aksi sangatlah penting, untuk mendapatkan masa aksi tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan sebuah kesepakatan antar organisasi-organisasi gerakan mahasiswa, karena dari masing-masing organisasi tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda, agar menghasilkan sebuah kesepakatan maa tindakan yang akan kita lakukan adalah konsolidasi, selepas dari itu maka kita melakukan kajian dan mengalisa isu yang akan kita angkat. Berikut bagan terkait dengan Pola Komunikasi Gerakan Mahasiswa :

Bagan Pola Komunikasi Gerakan Mahasiswa



³⁷ Wawancara dengan Iqbal SMI